

PENGARUH PENGENDALIAN INTERN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN YANG BERIMPLIKASI TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD

Memen Kustiawan

Fakultas Pendidikan Ekonomi Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia

Email: memen_kustiawan@yahoo.com

Abstract: The Influence of Internal Control and Audit Findings Follow-up Toward the Quality of Financial Statement Which Imply in Preventing Fraud. This research aimed to find out the influence of internal control and audit findings follow-up toward the quality of financial statement which imply in preventing fraud. The analysis sample of this research was all Government Universities (*Perguruan Tinggi Negeri*) in West Java which was 15 of those universities were the population of this research (census). Besides giving questionnaires and having interview, doing observation and studying documentation of divisions that handle the financial report in each university were necessary to get the secondary data and interview result of Internal Auditor, if the university was part of Internal Auditor. According to the output of counting path analysis by using Lisrel 8.3 program, it was concluded that the internal control (20.27%) was more dominant than the audit findings follow-up (12.27%) in influencing the quality of financial statement and the influence of financial statement quality in preventing fraud was 2.89%. Based on the whole internal control variables, audit findings follow-up, and quality of financial statement altogether showed the influence toward the fraud prevention was 35.96%.

Key words: internal control, audit findings follow-up, quality of financial statement, and fraud prevention

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern dan tindak lanjut temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan yang berimplikasi terhadap pencegahan fraud. Unit analisis penelitian ini adalah seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Barat yang merupakan populasi penelitian (sensus) sebanyak 15 (lima belas) PTN. Selain penyebaran kuesioner dan wawancara, juga dilakukan observasi dan studi dokumentasi pada bagian yang menangani laporan keuangan masing-masing di perguruan tinggi untuk mendapatkan data sekunder serta wawancara pada bagian Satuan Pengawasan Internal (SPI) apabila PTN tersebut memiliki bagian SPI. Berdasarkan hasil (*output*) perhitungan analisis jalur dengan menggunakan program Lisrel 8.3 dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern (20,27%) lebih dominan daripada tindak lanjut temuan audit (12,27%) dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dan pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap pencegahan fraud sebesar 2,89%. Secara keseluruhan variable pengendalian intern, tindak lanjut temuan audit, dan kualitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan fraud sebesar 35,96%.

Kata kunci: pengendalian intern, tindak lanjut temuan audit, kualitas laporan keuangan, dan pencegahan fraud.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis yang terdiri lebih dari 17.000 kepulauan dengan berbagai flora dan fauna di dalamnya merupakan modal besar bangsa Indonesia untuk maju menjadi negara besar di dunia. Sumber Daya Alam (SDA) seperti bahan tambang, perkebunan, perikanan sedemikian melimpahnya serta Sumber Daya Manusia (SDM) dengan populasi yang cukup besar menjadi peluang dan aset besar dalam pembangunan. Namun demikian, kekuatan ini perlu ditunjang dengan kualitas SDM yang memadai. Upaya peningkatan kualitas SDM hanya dapat dicapai melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan satu sektor penting yang dinamis, selalu berubah menyesuaikan, dan akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan Tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Peran strategis tersebut dilakukan dalam upaya memenuhi amanat Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbunyi : “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Oleh sebab itu pendidikan tinggi diperlukan sebagai upaya untuk terus meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang saat ini dan di masa yang akan datang” (DPT DIKTI, 2013).

Namun demikian pada kenyataannya dalam upaya mewujudkan peran idealnya tersebut, penyelenggaraan pendidikan tinggi masih menghadapi sejumlah kendala baik segi kebijakan, implementasi, pelaporan keuangan, pengawasan dan tindak lanjutnya, pengendalian intern, terkait persoalan akses mutu, anggaran dan pembiayaan, relevansi, tata kelola perguruan tinggi, keleluasaan untuk mengembangkan unit yang ada dibawah pengendaliannya seperti membuka program studi baru, jurusan atau fakultas baru, serta persoalan lainnya yang harus disikapi dengan bijak agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan berimplikasi terhadap pencegahan terjadinya kecurangan (*fraud*). Contoh kasus yang merupakan fenomena dan menimpa kepada beberapa perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diantaranya adalah :

Kejadian yang disajikan dalam Tabel 1 tersebut tidak mesti terjadi dan walaupun terpaksa terjadi, maka akan dengan cepat terdeteksi apabila laporan keuangan institusi perguruan tinggi tersebut memiliki kualitas yang tinggi karena dengan sendirinya pengendali internnya sudah berjalan dengan baik, begitu juga apabila ada temuan audit pasti dengan segera akan ditindaklanjuti sampai tuntas.

Merujuk kepada *agency theory* dalam konteks perguruan tinggi negeri (milik pemerintah), bahwa yang menjadi *principal* (pemberi amanat) adalah seluruh masyarakat (rakyat), sedangkan manajemen (*agent/steward*, yang diberi amanat) adalah pemerintah (dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif, dalam arti sempit adalah pejabat struktural di perguruan tinggi negeri). Dengan demikian, pejabat struktural (manajemen) di perguruan tinggi negeri harus menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan dan keinginan *principal* yakni seluruh rakyat Indonesia. Perlu disadari bahwa semakin berkembangnya suatu organisasi, maka semakin jauh jarak antara manajemen (*agent*)

dengan pihak yang mempercayakan kekayaannya (*capital supplier*) atau *principal* (Jensen dan Meckling, 1976).

Tabel 1. Contoh Kasus Dugaan Fraud

No.	Tahun	PTN	Kasus
1	2013	UNSOED (Univ Jenderal Soedirman)	Dugaan korupsi proyek kerjasama Unsoed dan PT Antam senilai Rp 1M. (Suatmadji http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=74150#.UsIDZXbF-kl)
2	2013	UI (Univ Indonesia)	Dugaan penggelembungan anggaran pembangunan perpustakaan.(http.www.republika.co.id/berita/nasiona/hukum/13/06/18)
3	2013	UM (Univ. Negeri Malang)	Dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan laboratorium FMIPA. (www.lensaIndonesia.com)
4	2013	UNJ	Dugaan korupsi dana PNPB dan pengadaan alat labolatorium serta alat penunjang. (www.republika.co.id)
5	2015	UIN Malang	Dugaan korupsi pengadaan lahan pengembangan UIN Malang (www.mcw.malang.org).
6	2016	PTKI (Perguruan Tinggi Kimia Industri)	Dugaan korupsi pembangunan pabrik mini kelapa sawit dan laboratorium (medan.tribunnews.com)

Sumber: website diolah sendiri

Walaupun terjadi pemisahan fungsi yang berbeda antara manajemen (*steward*) dengan pemilik (*principal*), namun seharusnya tujuan kepentingan (*interest*) antara agent dan *principal* tersebut sama yakni memaksimalkan organisasi. Sebagai pihak yang diberi amanat, manajemen dapat bekerja atas nama (*on behalf*) pemilik untuk mencapai peningkatan kemakmuran rakyat (*principal*). Namun kenyataannya, masih ditemukan yakni pihak manajemen memiliki *interest* yang berbeda dengan amanah yang diberikan oleh *principal*. Manajemen berusaha untuk meningkatkan kemakmuran dirinya sendiri bukan untuk meningkatkan nilai institusi seperti fenomena yang dikemukakan di atas. Konflik kepentingan yang demikian mestinya tidak terjadi apabila pihak manajemen ikut merasa memiliki (*sense of belonging*) pada institusi tersebut.

KAJIAN TEORI

Agency Theory. Perguruan Tinggi Negeri merupakan sebuah organisasi yang cukup besar dan kompleks milik pemerintah, sebagai organisasi yang besar maka harus dikelola secara professional. Pengelolaan perguruan tinggi negeri sebagaimana organisasi sektor swasta dikelola oleh sekelompok orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola organisasi. Pada sektor swasta para stakeholder yang disebut *principal* dan orang yang diberi amanat disebut *agent*. Teori ini dikenal dengan *agency theory*.

Agency theory bertujuan untuk mempelajari pemecahan masalah dalam hubungan keagenan. Permasalahan tersebut terdiri dari dua masalah pokok yakni : (1) ada konflik tujuan dari *principal* dan *agent*, dan (2) terlalu sulit atau mahal bagi *principal* untuk mengetahui yang dilakukan oleh *agent*. Permasalahan kedua merupakan permasalahan *risk sharing* yang timbul ketika *principal* dan *agent* terdapat perbedaan tindakan dalam menyikapi risiko tersebut.

Tiga asumsi sifat dasar manusia untuk menjelaskan *agency theory* yaitu : (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*), (Eisenhardt, 1989). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajemen sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (*agent self-interest*) karena dihadapkan kepada dua pilihan dalam kontrak yaitu : (a) *behavior-based* : *principal* harus memonitor perilaku *agent*, dan (b) *outcome-based* : adanya insentif untuk memotivasi *agent* untuk mencapai kepentingan *principal* (Carr & Brower, 2000).

Hubungan keagenan merupakan kontrak yang melibatkan satu atau lebih *principal* dengan *agent* untuk melaksanakan pekerjaan yang melibatkan sebagian pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pelimpahan sebagian wewenang dari *principal* kepada *agent* akan mengakibatkan *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan dari *principal* karena *agent* mempunyai kepentingan sendiri (Jensen dan Meckling, 1976, dan Ross, 1973).

Pendelegasian memiliki konsekuensi tidak terkontrolnya keputusan *agent* oleh *principal* dalam hubungan legislatif-publik, yang selanjutnya dikenal dengan istilah abdikasi (*abdication*) yaitu suatu kondisi *agent* dalam posisi tidak dipagari dengan aturan tentang tindakan yang akan berpengaruh terhadap kepentingan *principal*. Dengan demikian, pemilih (*voters*) dipandang sebagai pihak yang tidak peduli atau tidak berkeinginan untuk mempengaruhi parlemen (anggota legislatif) yang mereka pilih. Di lain pihak, legislatif dipandang sebagai pihak yang tidak memiliki waktu, inklinasi (*inclination*), dan pengetahuan untuk mengetahui seluruh kebutuhan publik. *Stereotypes* inilah yang menyebabkan terjadinya abdikasi yaitu keterwakilan yang tidak memberikan manfaat bagi pemilih (*voters*) atau pihak yang diwakili. Pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (*principal*) memilih orang atau kelompok lain (*agent*) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, dengan perkataan lain salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa *agent* akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal* dalam hal terjadi pendelegasian wewenang (Lupia & Mc Cubbins, 2000).

Menurut Lane (2003), Moe (1984), teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik karena dalam Negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan *principal-agent*. Rerangka hubungan *principal-agent* merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni *asymmetric information*, *moral hazard* dan *adverse selection*.

Di pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam kesepakatan-kesepakatan *principal-agent* yang dapat ditelusuri melalui proses anggaran, pemilih (*voters*)-legislatif, legislatif-pemerintah, menteri keuangan – pengguna anggaran, perdana menteri – birokrat, dan

pejabat pemberi layanan (Moe, 1984). Hal senada dikemukakan oleh Gilardi, 2001, dan Strom, 2000 bahwa hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian (*chains of delegation*), yaitu pendelegasian dari masyarakat kepada wakilnya di parlemen, dari parlemen kepada pemerintah, dari pemerintah sebagai satu kesatuan kepada seorang menteri, dan dari pemerintah kepada birokrat. Hubungan tersebut tidaklah selalu mencerminkan hirarki, akan tetapi terkadang berupa hubungan pendelegasian seperti yang dinyatakan oleh Andvig et al, 2001.

Sebagai principal, legislatif dapat juga berperilaku moral hazard atau dalam merealisasikan self interest nya (Elgie & Jones, 2001) seperti berlaku korup (*corrupt principals*) (Andvig et al, 2001). Menurut Colombatto (2001) adanya *discretionary power* di salah satu pihak akan menimbulkan pelanggaran atas kontrak keagenan seperti terjadinya perilaku *rent-seeking* dan korupsi.

Hubungan antara principal dan agen berkaitan dengan akuntansi karena antara principal dan agent seringkali berdasarkan pada laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen itu sendiri. Pada kenyataannya, agen memiliki lebih banyak informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan organisasi secara keseluruhan. Situasi ini memicu adanya suatu kondisi yang disebut asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak stakeholder (*principal*) sebagai pengguna informasi.

Pengendalian Intern. Pengendalian intern (*internal control*) adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan manajemen dalam kategori: (1) keandalan laporan keuangan, (2) efisiensi dan efektifitas operasi, dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Arens, 2014:339, H. Al Khaddash, R. Al Nawas & Abdulhadi Ramadan, 2013). Komponen pengendalian intern yang dirancang dan diterapkan manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian dapat terpenuhi yaitu: Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan (COSO, 2010; F Al Sawlqa & Ata Qtish, 2012).

Pengendalian intern yang baik lebih mampu mencegah kecurangan (*fraud*) dibandingkan dengan temuan yang didapatkan para auditor yang baik. Lemahnya pengendalian intern merupakan penyebab utama terjadinya kecurangan, dan yang paling bertanggungjawab atas pengendalian adalah yang bertanggungjawab atas tata kelola entitas dan manajemen. Esensi dari suatu pengendalian intern yang efektif terletak pada sikap manajemen. Jika manajemen puncak yakin bahwa pengendalian itu sangat penting, maka orang-orang lainnya dalam organisasinya akan ikut merasakan hal tersebut dan merespons dengan mengamati dengan hati-hati pengendalian yang ditegakkan. Sebaliknya, jika orang-orang dalam organisasi yakin bahwa pengendalian itu bukan merupakan perhatian penting bagi manajemen puncak, maka hampir dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian manajemen tidak akan tercapai dengan efektif (M. Agung, 2015; Oguda, Albert & Byaruhanga, 2015).

Pengendalian intern yang efektif, dapat dipercayanya data akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan perkataan lain dapat mencegah terjadinya kecurangan karena dengan adanya pengendalian intern, pengecekan

akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain sehingga tindakan kecurangan akuntansi dapat dikurangi. Sebaliknya, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Tindak Lanjut Temuan Audit. Tindak lanjut temuan audit adalah setiap langkah perbaikan atau penyempurnaan atau penertiban atau penindakan yang dilakukan oleh pejabat atau pimpinan satuan kerja sesuai saran (rekomendasi) tindak lanjut atas temuan audit.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan tindak lanjut audit dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semesteran. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan bahwa hasil penelaahan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu: (1) Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (2) Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; (3) Rekomendasi belum ditindaklanjuti; (4) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Menurut Johnson et. al (2012) *management letter comment* berhubungan dengan kualitas laporan keuangan. Tindak lanjut hasil temuan audit yang dilaksanakan diharapkan mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada sebelumnya, sehingga hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

Kualitas Laporan Keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2015 bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna.

Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomik, keputusan ini mungkin mencakup, sebagai contoh keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Laporan keuangan yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan informasi asimetris. Informasi asimetris timbul ketika manajemen lebih

mengetahui informasi internal dan prospek institusi di masa depan di banding dengan principal (DM. Van Slyke, 2002).

Kualitas laporan keuangan merupakan tingkat kepercayaan penyajian informasi keuangan yang dinilai berdasarkan perolehan opini auditor. Tanggung jawab auditor terletak pada opini yang dikeluarkannya, sedangkan tanggungjawab manajemen adalah terhadap penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian intern yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Auditor yang melaksanakan audit bertanggungjawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi, walaupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik (IAPI, 2013; M. Salahi & ZA Zary, 2013).

Jenis opini yang dapat diberikan oleh auditor ada 4 (empat) macam yaitu:

- 1) *Unqualified opinion* (opini wajar tanpa pengecualian disingkat WTP) yaitu opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 2) *Qualified opinion* (opini wajar dengan pengecualian disingkat WDP) yaitu opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
- 3) *Disclaimer opinion* atau *No opinion* (pernyataan menolak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat) yaitu suatu pernyataan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan;
- 4) *Adverse opinion* (pendapat tidak wajar) yaitu opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material bila dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan.

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif pokok yaitu: (1) dapat difahami, (2) relevan, (3) keandalan, dan (4) dapat diperbandingkan (IAI 2015; Beest, Braam & Boelens, 2009)

Pencegahan *Fraud*. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2013, kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

Pencegahan *fraud* adalah upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*) (Sudarmo, T. Sawardi dan Agus Yulianto, 2008:37-38) yaitu: (1) Memperkecil peluang terjadinya kesempatan (*opportunities*) untuk berbuat kecurangan; (2) Menurunkan tekanan (*incentives/pressure*) kepada pegawai agar ia

mampu memenuhi kebutuhannya; (3) Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan (*attitudes/rationalization*).

Menurut Arens *et al* (2014: 354-355) dan *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2010) tiga faktor penyebab terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan (*fraudulent financial statement*) dan penyalahgunaan aset (*misappropriation assets*) yang dikenal dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*) dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) *Incentives/pressures* (insentif/tekanan), manajemen atau pegawai lainnya memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan; (2) *Opportunities* (kesempatan), situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan; (3) *Attitudes/rationalization* (sikap/rasionalisasi), adanya suatu sikap, karakter atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam suatu lingkungan yang memberikan mereka tekanan yang cukup besar sehingga menyebabkan mereka membenarkan melakukan perilaku yang tidak jujur tersebut.

Manajemen bertanggungjawab untuk menerapkan tata kelola dan prosedur pengendalian untuk meminimalkan risiko kecurangan yang dapat dikurangi melalui kombinasi antara tindakan pencegahan (*prevention*), antisipasi (*deterrence*), dan pendeteksian (*detection*) dengan tiga elemen berikut: (1) Budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi; (2) Tanggungjawab manajemen untuk mengevaluasi risiko-risiko kecurangan; (3) Pengawasan dari komite audit.

Tanggungjawab utama untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada dua pihak yaitu yang bertanggungjawab atas tata kelola entitas dan manajemen. Merupakan hal penting bahwa manajemen dengan pengawasan oleh pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, menekankan pencegahan kecurangan yang dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan, dan pencegahan kecurangan (*fraud deterrence*) yang dapat membujuk individu-individu agar tidak melakukan kecurangan karena kemungkinan akan terdeteksi dan terkena hukuman. Hal ini memerlukan komitmen untuk menciptakan budaya jujur dan perilaku etis yang dapat ditegakkan dengan pengawasan aktif oleh pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola. Pengawasan oleh pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola meliputi pertimbangan tentang potensi pengesampingan pengendalian atau pengaruh tidak patut atas proses pelaporan keuangan.

Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan (*fraud*) didefinisikan sebagai salah saji dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Dua kategori utama *fraud* adalah kecurangan dalam laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) dan penyalahgunaan aset (*misappropriation assets*). Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya. Sebagian besar kasus melibatkan salah saji terhadap jumlah yang dilaporkan dibandingkan dengan pengungkapan. Berdasarkan kajian teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang masing-masing tertuang dalam jurnal yang bereputasi yang telah penulis kemukakan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1. Pengendalian Intern dan Tindak Lanjut Temuan Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sub Hipotesis:

- (1) Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
- (2) Tindak Lanjut Temuan Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis 2. Pengendalian Intern dan Tindak Lanjut Temuan Audit berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud

Sub Hipotesis:

- (1) Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud
- (2) Tindak Lanjut Temuan Audit berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud

Hipotesis 3. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian menurut tingkat ekplanasi untuk permasalahan asosiatif yang menggunakan hubungan kausal. Yang dimaksud dengan penelitian menurut tingkat eksplanasi ini adalah tingkat penjelasan, yaitu bagaimana variabel-variabel yang diteliti itu akan menjelaskan objek yang diteliti melalui data yang terkumpul. Sedangkan yang dimaksud dengan permasalahan asosiatif adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat menghubungkan dua variabel atau lebih. Dan yang dimaksud dengan hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat (artinya ada variabel yang mempengaruhi atau variabel penyebab dan ada variabel yang dipengaruhi atau variabel akibat) (Sugiono, 2004:11,36-37).

Objek penelitian ini adalah membahas tentang hubungan kausal (hipotesis 1, 2, dan 3) yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat (artinya, ada variabel yang mempengaruhi atau variabel penyebab (*eksogenous variable*), dan ada variabel yang dipengaruhi atau variabel akibat (*endogenous variable*). Penelitian ini mengkaji kualitas laporan keuangan yang dipengaruhi oleh pengendalian intern dan tindak lanjut temuan audit yang berimplikasi terhadap pencegahan *fraud*.

Populasi penelitian ini adalah kumpulan atau himpunan elemen-elemen atau unsur-unsur yang didalamnya ada sesuatu atau karakteristik yang ingin diselidiki dengan menggunakan metoda statistik. Elemen-elemen atau unsur-unsur yang ingin diselidiki dalam penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Barat. Sedangkan karakteristik yang ingin diselidiki dalam penelitian ini adalah pengendalian intern, tindak lanjut temuan audit, kualitas laporan keuangan dan pencegahan *fraud*.

Unit analisis penelitian ini adalah seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Barat yang merupakan populasi penelitian (sensus) sebanyak 15 (lima belas) PTN. Selain penyebaran kuesioner dan wawancara, juga dilakukan observasi dan studi dokumentasi pada bagian yang menangani laporan keuangan masing-masing di perguruan tinggi untuk mendapatkan data sekunder serta wawancara pada bagian Satuan Pengawasan Internal (SPI) apabila PTN tersebut memiliki bagian SPI.

Penelitian ini memerlukan jenis data kualitatif atau data primer dan data sekunder. Data kualitatif yaitu pendapat dari para responden yang diteliti. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.

Metode analisis dalam penelitian ini secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yakni: (1) Analisis kuantitatif yaitu menggunakan analisis jalur (*path analysis*); dan (2) Analisis kualitatif yaitu berdasarkan teori dan rasionalitas, digunakan untuk melengkapi hasil analisis secara kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS dengan menggunakan korelasi Rank Spearman (Spearman's Rho) diperoleh hasil uji validitas instrumen penelitian (kuesioner) sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrument Penelitian

Instrumen Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Keterangan
Pengendalian Intern	2.082 – 3.420	2.045	Valid
Tindak Lanjut Temuan Audit	2.197 – 3.543	2.045	Valid
Kualitas Laporan Keuangan	2.139 – 3.683	2.045	Valid
Pencegahan Fraud	2.497 – 4.364	2.045	Valid

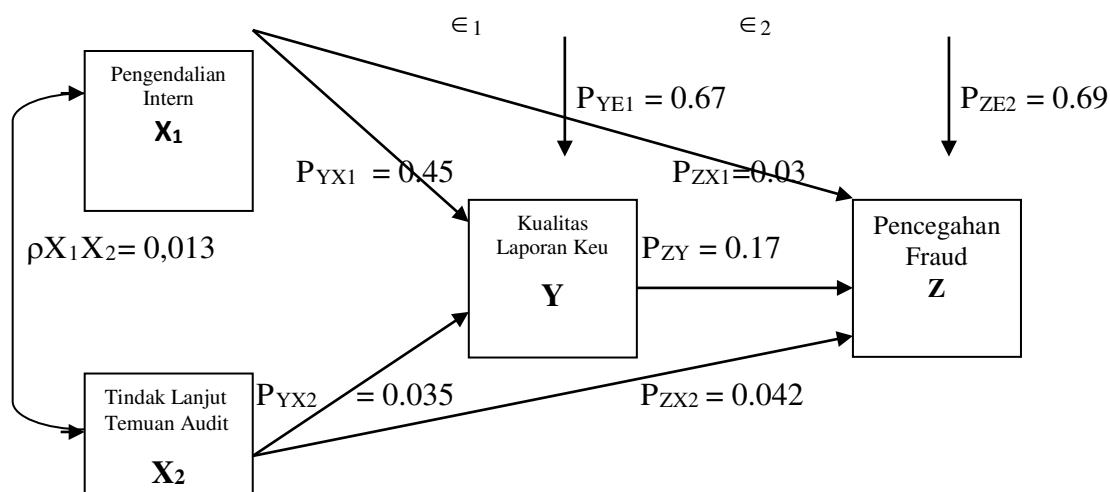
Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas dengan teknik belah dua (split half) melalui software SPSS seluruh rangkaian item yang sah (valid) pada instrument dinyatakan handal (reliable) sebagai berikut:

Tabel 3. Item Yang Reliabel

Nama Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Keterangan
Pengendalian Intern	3,4092	2,045	Reliabel
Tindak Lanjut Temuan Audit	5,7100	2,045	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	3,5197	2,045	Reliabel
Pencegahan Fraud	4,3263	2,045	Reliabel

Pengujian Hipotesis. Bagian ini merupakan bagian pokok dari analisis kuantitatif, yaitu bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis penelitian, dilakukan dengan menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*) dan analisis korelasi, melalui program Lisrel 8.3. di antaranya diperoleh hasil seperti pada Gambar 1.

(a) Diagram jalur (*path diagram*),



Gambar 1 Model Kausal Pengaruh Pengendalian Intern dan Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Berimplikasi Terhadap Pencegahan Fraud

(b) Persamaan Struktural

$$Y = 0.45 \cdot X_1 + 0.035 \cdot X_2, \text{Errorvar.} = 0.67, R^2 = 0.33$$

$$Z = 0.17 \cdot Y + 0.498 \cdot X_1 + 0.042 \cdot X_2, \text{Errorvar.} = 0.69, R^2 = 0.31$$

Berdasarkan output Lisrel 8.3 sebagaimana disajikan di atas, untuk menguji hipotesis akan dikemukakan satu persatu berdasarkan urutan hipotesis. Di samping itu sebagai hasil sampingan dari analisis jalur (*path analysis*) dihasilkan pula nilai korelasi antara X_1 dan X_2 . Korelasi antara X_1 dan X_2 adalah positif (0,013). Artinya ketika nilai X_1 naik, nilai X_2 pun naik. Jika X_1 naik maka Y naik, begitu juga jika X_2 naik, maka Y naik. Dengan demikian X_1 naik atau X_2 naik menyebabkan Y naik sesuai X_1 berkorelasi positif dengan X_2 .

Pengaruh Pengendalian Intern dan Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis sebagaimana telah disajikan di muka, ternyata pengendalian intern dan tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini selaras dengan hipotesis 1 yang telah dikemukakan di atas. Kondisi ini sejalan pula dengan teori aplikasi audit dari Arens, 2014:339 bahwa salah satu tujuan dari pengendalian intern adalah terjadinya keandalan laporan keuangan, dan temuan audit mesti ditindak lanjuti sebagaimana dikemukakan oleh Johnson et. al (2012) bahwa *management letter comment* berhubungan dengan kualitas laporan keuangan. Tindak lanjut hasil temuan audit yang dilaksanakan diharapkan mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada sebelumnya, sehingga hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya, pembahasan hasil pengujian masing-masing sub-hipotesis untuk hipotesis 1 di atas, disajikan sebagai berikut.

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil (*output*) perhitungan analisis jalur dengan menggunakan program Lisrel 8.3, ternyata variabel pengendalian intern (X_1) berpengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y), yang ditunjukkan oleh koefisien jalur lebih dari nol (> 0) atau positif, yaitu 0,45. Berdasarkan perhitungan, bahwa besarnya pengaruh X_1 terhadap Y adalah 20,27%. Dengan perkataan lain, pengendalian intern dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hasil analisis jalur ini didukung pula oleh analisis deskriptif hasil penyebaran kuesioner ternyata kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh pengendalian intern yaitu tidak mungkin laporan keuangan memiliki kualitas yang baik tanpa memiliki pengendalian intern yang baik pula, karena salah satu tujuan pengendalian intern adalah dapat dipercaya nya akuntansi (keandalan laporan keuangan).

Pengaruh Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Variabel tindak lanjut temuan audit (X_2) berpengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar 0,035. Berdasarkan perhitungan, bahwa besarnya pengaruh X_2 (tindak lanjut temuan audit) terhadap Y (kualitas laporan keuangan) adalah 12,27%.

Persepsi responden mengenai tindak lanjut temuan audit secara rata-rata dapat dikatakan sudah direspon oleh pihak manajemen perguruan tinggi negeri sesuai dengan rekomendasi karena apabila pejabat tersebut diketahui tidak melaksanakan tindak lanjut audit dalam

jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, pejabat tersebut dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Adapun apabila ada temuan yang tidak mungkin dapat diselesaikan sekaligus tindak lanjutnya, dapat dikomunikasikan kepada auditor menyangkut masalah estimasi akuntansi dimaksud sesuai Standar Audit (SA) 540 tentang Audit Atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar dan Pengungkapan Yang Bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pengendalian intern (20,27%) lebih dominan daripada tindak lanjut temuan audit (12,27%) dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan perkataan lain bahwa kualitas laporan keuangan yang berimplikasi terhadap pencegahan fraud lebih dipengaruhi oleh pengendalian intern ($P_{YX1}=0,45$) bila dibanding dengan tindak lanjut temuan audit ($P_{YX2}=0,035$) begitu juga berdasarkan hasil analisis deskriptif pengendalian intern lebih dominan daripada tindak lanjut temuan audit karena apabila pengendalian internnya baik maka laporan keuangannya akan memiliki kualitas yang tinggi yang dengan sendirinya temuan auditnya pun bukan merupakan temuan audit yang material yang dapat mengganggu terhadap opini audit.

Pengaruh Pengendalian Intern dan Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Pencegahan Fraud. Bagian ini merupakan pembahasan hubungan kausal antara pengendalian intern dan tindak lanjut temuan audit terhadap pencegahan *fraud* (hipotesis 2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern dan tindak lanjut temuan audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sebagaimana halnya terhadap kualitas laporan keuangan, kondisi ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan IAPI 2013 bahwa tanggungjawab utama untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada dua pihak yaitu yang bertanggungjawab atas tata kelola entitas dan manajemen. Merupakan hal penting bahwa manajemen dengan pengawasan oleh pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, menekankan pencegahan kecurangan yang dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan, dan pencegahan kecurangan (*fraud deterrence*) yang dapat membujuk individu-individu agar tidak melakukan kecurangan karena kemungkinan akan terdeteksi dan terkena hukuman. Hal ini memerlukan komitmen untuk menciptakan budaya jujur dan perilaku etis yang dapat ditegakkan dengan pengawasan aktif oleh pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola. Pengawasan oleh pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola meliputi pertimbangan tentang potensi pengesampingan pengendalian atau pengaruh tidak patut atas proses pelaporan keuangan. Pembahasan hasil pengujian hipotesis 2 penyajiannya dilakukan per pokok bahasan sebagai berikut:

Pertama. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud. Berdasarkan perhitungan analisis jalur, dapat dilihat pengaruh pengendalian intern (X_1) terhadap pencegahan *fraud* (Z) sebagai berikut: (1) Pengaruh langsung sebesar 0,09%; (2) Pengaruh tidak langsung X_1 terhadap Z melalui Y adalah sebesar 0,23%. Dari kedua pengaruh tersebut diperoleh pengaruh total pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* sebesar 0,32%. Dengan demikian pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Artinya, pengendalian intern dapat meningkatkan pencegahan *fraud*.

Kedua. Pengaruh Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Pencegahan Fraud.

Begitu juga untuk melihat pengaruh tindak lanjut temuan audit terhadap pencegahan fraud dapat dihitung dengan cara yang sama, hasilnya sebagai berikut: (1) Pengaruh langsung adalah sebesar 0,18%; (2) Pengaruh tidak langsung X_2 terhadap Z melalui Y adalah sebesar 0,035%.

Sehingga total pengaruh X_2 (tindak lanjut temuan audit) terhadap Z (pencegahan fraud) adalah 0,215%, walaupun kecil pengaruh tindak lanjut temuan audit tersebut bersifat positif. Dengan demikian tindak lanjut temuan audit (X_2) berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud (Z).

Tindak lanjut temuan audit (X_2) tidak lebih dominan daripada pengendalian intern (X_1) dalam mempengaruhi pencegahan fraud. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh total tindak lanjut temuan audit (X_2) terhadap pencegahan fraud (Z) yang besarnya 0,215%, sedangkan pengaruh total pengendalian intern (X_1) terhadap pencegahan fraud (Z) hanya sebesar 0,32%.

Ketiga. Kualitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud.

Berdasarkan hasil (*output*) perhitungan analisis jalur dengan menggunakan program Lisrel 8.3 dan perhitungan lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan mempunyai implikasi terhadap pencegahan fraud. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien jalur antara Y (kualitas laporan keuangan) dan Z (pencegahan fraud) yang menunjukkan angka positif yaitu sebesar 0,17. Kontribusi kualitas laporan keuangan terhadap pencegahan fraud dapat dikatakan kecil (2,89%). Secara keseluruhan variabel-variabel X_1 (pengendalian intern), X_2 (tindak lanjut temuan audit), dan Y (kualitas laporan keuangan) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Z (pencegahan fraud) sebesar 35,96%.

Beberapa hal yang merupakan jawaban atas pertanyaan “mengapa (*why*)” dan “bagaimana (*how*) akibat” kontribusi kualitas laporan keuangan terhadap pencegahan fraud (Y terhadap Z) yang hanya sebesar 2,89% dan pengaruh pengendalian intern, tindak lanjut temuan audit, dan kualitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan fraud (X_1 , X_2 , dan Y terhadap Z) yang juga hanya 35,96% dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Walaupun kontribusi kualitas laporan keuangan terhadap pencegahan fraud (Y terhadap Z) hanya sebesar 2,89% (kecil) dan pengaruh pengendalian intern, tindak lanjut temuan audit, dan kualitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan fraud (X_1 , X_2 , dan Y terhadap Z) hanya sebesar 35,96%, model penelitian ini merupakan model yang logis, memenuhi syarat dan pantas sekali (pas benar) dengan data. Pernyataan ini ditunjukkan oleh output Lisrel 8.3 yang menyatakan : “*The Model is Saturated, the Fit is Perfect*”. Logisnya penelitian ini didukung pula oleh besarnya koefisien korelasi antara pengendalian intern dan tindak lanjut temuan audit yang bersifat positif (0,013). Artinya ketika nilai pengendalian intern naik, nilai tindak lanjut temuan audit naik pula. Jika pengendalian intern naik, maka kualitas laporan keuangan naik, begitu juga jika tindak lanjut temuan audit naik, kualitas laporan keuangan naik pula. Dengan demikian pengendalian intern naik atau tindak lanjut temuan audit naik menyebabkan kualitas laporan keuangan naik, sesuai dengan pengendalian intern yang berkorelasi positif dengan tindak lanjut temuan audit.
- 2) Setelah dilakukan penelitian, **ternyata** kontribusi kualitas laporan keuangan terhadap pencegahan fraud (Y terhadap Z) hanya sebesar 2,89% (kecil) dan pengaruh

pengendalian intern, tindak lanjut temuan audit, dan kualitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan fraud (X_1 , X_2 , dan Y terhadap Z) hanya sebesar 35,96%. Hal ini berarti pencegahan fraud, hanya 35,96% ditentukan oleh pengendalian intern, tindak lanjut temuan audit, dan kualitas laporan keuangan, dan sebesar 64,04% ditentukan oleh faktor lain. Kondisi ini menimbulkan rasa penasaran kepada peneliti untuk mengetahui mengapa koefisien determinasi (R^2) ini demikian kecil. Sementara itu, jumlah variabel dalam penelitian ini sudah demikian lengkap/banyak yang selanjutnya disederhanakan menjadi 4 variabel dan telah merujuk kepada teori yang sangat fundamental. Teori tersebut adalah “Agency theory”.

Akhirnya setelah ditelusuri lebih lanjut, kecilnya pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap pencegahan fraud (Y terhadap Z hanya sebesar 2,89%) dan kecilnya pengaruh pengendalian intern, tindak lanjut temuan audit, dan kualitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan fraud (X_1 , X_2 , dan Y terhadap Z) hanya sebesar 35,96%, **ternyata** tidak beda jauh dengan pendapat salah seorang pakar keuangan negara yang bernama Norman D. Nowak (*Assistant Regional Commissioner of the Internal Revenue Service in the New York Region* dan sebagai *Professor at New York University's Graduate School of Public Administration*) yang menyatakan : “peningkatan penerimaan negara akibat verifikasi akuntan pajak (*Internal Revenue Service/IRS*), aktivitas para ahli hukum, serta teknisi lainnya dan keputusan pengadilan, biasanya hanya merupakan tiga sampai lima persen (3% s.d. 5%) dari seluruh penerimaan, sedangkan sisanya sebesar sembilan puluh lima persen (95%) adalah hasil dari pengembangan iklim perpajakan (Nowak, 1970:3)”.

Dengan demikian, ternyata setelah dilakukan penelitian pada perguruan tinggi negeri di Jawa Barat, bahwa pendapat Norman D. Nowak berlaku juga di Indonesia khususnya dalam upaya pencegahan fraud pada perguruan tinggi negeri di Propinsi Jawa Barat. Hal ini mengandung makna, penelitian ini merupakan penelitian yang sangat logis. Di samping itu, kecilnya pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap pencegahan fraud (Y terhadap Z) dan kecilnya pengaruh pengendalian intern, tindak lanjut temuan audit serta kualitas laporan keuangan secara bersama-sama terhadap pencegahan fraud (X_1 , X_2 , dan Y terhadap Z) bukan karena kurangnya variabel penelitian yang dilibatkan atau bukan karena kelengahan peneliti dalam menentukan variabel penelitian, melainkan karena sangat tergantung kepada kesadaran manajemen untuk bertanggungjawab dalam menerapkan tata kelola dan prosedur pengendalian untuk meminimalkan risiko kecurangan yang dapat dikurangi melalui kombinasi antara tindakan pencegahan (*prevention*), antisipasi (*deterrence*), dan pendeteksian (*detection*) dengan tiga elemen : (1) budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi, (2) tanggungjawab manajemen untuk mengevaluasi risiko-risiko kecurangan, dan (3) Pengawasan dari komite audit sebagaimana dikemukakan oleh COSO (2010).

PENUTUP

Simpulan. Hasil (*output*) perhitungan analisis jalur dengan menggunakan program Lisrel 8.3, menunjukkan bahwa semua hipotesis (hipotesis 1, 2 dan 3) yang diajukan diterima yaitu variabel pengendalian intern (X_1) berpengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y), yang ditunjukkan oleh koefisien jalur lebih dari nol (> 0) atau

positif, yaitu 0,45, dan besarnya pengaruh X_1 terhadap Y adalah 20,27%. Dengan perkataan lain, pengendalian intern dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Begitu juga, variabel tindak lanjut temuan audit (X_2) berpengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar 0,035, dan besarnya pengaruh tindak lanjut temuan audit (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) adalah 12,27%.

Pengaruh pengendalian intern (X_1) terhadap pencegahan *fraud* (Z), memiliki pengaruh secara langsung sebesar 0,09%, pengaruh tidak langsung sebesar 0,23% dan pengaruh total pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* sebesar 0,32%. Dengan demikian pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Artinya, pengendalian intern dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. Pengaruh tindak lanjut temuan audit terhadap pencegahan *fraud*, memiliki pengaruh langsung sebesar 0,18%, pengaruh tidak langsung sebesar 0,035%, dan total pengaruh tindak lanjut temuan audit (X_2) terhadap pencegahan *fraud* (Z) adalah 0,215%, walaupun kecil pengaruh tindak lanjut temuan audit tersebut bersifat positif. Dengan demikian tindak lanjut temuan audit (X_2) berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (Z). Tindak lanjut temuan audit (X_2) tidak lebih dominan daripada pengendalian intern (X_1) dalam mempengaruhi pencegahan *fraud*. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh total tindak lanjut temuan audit (X_2) terhadap pencegahan *fraud* (Z) yang besarnya 0,215%, sedangkan pengaruh total pengendalian intern (X_1) terhadap pencegahan *fraud* (Z) hanya sebesar 0,32%.

Kualitas laporan keuangan mempunyai implikasi terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien jalur antara kualitas laporan keuangan (Y) dan pencegahan *fraud* (Z) yang menunjukkan angka positif yaitu sebesar 0,17. Kontribusi kualitas laporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* dapat dikatakan kecil (2,89%). Secara keseluruhan variabel-variabel pengendalian intern (X_1), tindak lanjut temuan audit (X_2), dan kualitas laporan keuangan (Y) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Z) sebesar 35,96%.

Berdasarkan uraian di atas kesimpulan umum dari penelitian ini adalah bahwa pengendalian intern (20,27%) lebih dominan daripada tindak lanjut temuan audit (12,27%) dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dan pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* sebesar 2,89%. Secara keseluruhan variabel pengendalian intern, tindak lanjut temuan audit, dan kualitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* sebesar 35,96%.

Keterbatasan penelitian ini adalah adanya keterbatasan waktu dan biaya berimplikasi kepada adanya keterbatasan unit analisisnya yaitu hanya pada PTN di Jawa Barat dan ternyata hasil analisisnya menunjukkan bahwa pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* (Y terhadap Z) yaitu hanya sebesar 2,89% (kecil) dan pengaruh pengendalian intern, tindak lanjut temuan audit, dan kualitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* (X_1 , X_2 , dan Y terhadap Z) hanya sebesar 35,96%, namun demikian model penelitian ini merupakan model yang logis, memenuhi syarat dan pantas sekali (pas benar) dengan data. Pernyataan ini ditunjukkan oleh output Lisrel 8.3 yang menyatakan: "*The Model is Saturated, the Fit is Perfect*". Logisnya penelitian ini didukung pula oleh besarnya koefisien korelasi antara pengendalian intern dan tindak lanjut temuan audit yang bersifat positif (0,013). Pengendalian intern naik atau tindak lanjut temuan audit naik menyebabkan kualitas

laporan keuangan naik, sesuai dengan pengendalian intern yang berkorelasi positif dengan tindak lanjut temuan audit.

Saran. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel yang sama tetapi unit analisisnya berbeda, misalnya apakah temuan penelitian ini berlaku juga di daerah lain seperti di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur atau bahkan se-Indonesia, karena kalau hanya melihat hasil (output) Lisrel 8.3 ternyata output tersebut menyatakan “*The Model is Saturated, the Fit is Perfect*”, yang mengandung makna bahwa model penelitian ini merupakan model yang logis, memenuhi syarat dan pantas sekali (pas benar) dengan data.

DAFTAR RUJUKAN

- Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener & Tina Soreide. (2001) “Corruption A Review of Contemporary Research”, *CMi Report*. Chr. Minchelsen Institute Development Studies and Human Right Report. R 2001: 7 Web: <http://www.cmi.no>.
- Anonymous, (2004) “UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara”, Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 66.
- , (2010) “Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan”, Lembaran Negara RI Th. 2010 No. 92.
- , (2013) “Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi”, Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) DIKTI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- , (2015) “Standar Akuntansi Keuangan (SAK)”, Ikatan Akuntan Indonesia, Per Efektif 2015.
- , (2013) “Standar Profesional Akuntan Publik: Standar Audit (SA) 240 dan Standar Audit (SA) 540”, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder dan Mark S. Beasley, (2014) *Auditing and Assurance Service : An Integrated Approach*, Fifteenth Edition. England. Pearson Education Limited. Working Paper 09-108.
- Beest, Ferdy V., Geert Braam & Suzanne Boelens, (2009) “Quality of Financial Reporting: measuring qualitative characteristics”, Nijmegen Center for Economic (NICE) Institute for Management Research Radboud University Nijmegen. Netherland, *Working Paper*.
- Carr, Jered B. & Ralph S. Brower, (2000) “Principle opportunism: Evidence from the organizational middle”, *Public Administration Quarterly* (Spring): 109-138.
- Colombatto, Enrico, (2001) “Discretionary power, rent-seeking and corruption”, University in Torino & ICER, *Working Paper*.
- DM Van Slyke, (2002) “Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship”, *Journal of Public Administration Research and Theory*. 17: 157-187.
- Eisenhardt, Kathleen M., (1989) “Agency Theory: An Assessment and Review”, *The Academy of Management Review*. 14 (1): 57-74.
- Elgie, Robert & Erik Jones, (2000) “Agent, principals and the study of institutions: Constructing a principal-centered account of delegation”, *Working document in the*

- Study of European Governance*. Number 5. Center for the study of European Governance (CSEG).
- Fawzi Al Sawalqa dan Ata Qtish, (2012) "Internal Control and Audit Program Effectiveness : Empirical Evidence from Jordan", *International Business Research*. 5 (9): 128-137.
- Gilardi, Fabrizio, (2001) Principal-agent models go to Europe : Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation, *Paper* presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK), 6-8 September 2001.
- Husam Al Khaddash, Rana Al Nawas & Abdulhadi Ramadan, (2013) "Factor Affecting the Quality of Auditing: The Case of Jordanian Commercial Banks" *International Journal of Business and Social Science*, 4 (11): 206-222.
- Jensen, Michael and William Meckling, (1976) "Theory of Firms: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure", *Journal of Financial Economics*. 3 (4): 98-160.
- Johnson, L.E., S. Lowensohn, J.L. Reck, dan S.P. Davies, (2012) "Management Letter Comment: Their Determinants and Their Association with Financial Reporting Quality In Local Government", *Journal Account Public Policy*, 31: 575-592.
- Lane, Jan-Erick. (2003), "Relevance of the Principal-agent framework to public policy and implementation", University of Geneva and National University of Singapore. *Working Paper*.
- Lupia, Arthur & Mathew Mc Cubbins, (2000) "Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed", *European Journal of Political Research*. 37: 291-307.
- M. Agung, (2015) "Internal Control Part of Fraud Prevention in Accounting Information System", *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 3 (12): 724-737.
- M. Salahi & Zhila Azary, (2013) "Fraud Detection and Audit Expectation Gap: Empirical Evidence from Iranian Bankers", *International Journal of Business and Management*, 3 (10): 65.
- Moe, T.M., (1984) "The New Economics of Organization", *American Journal of Political Science*, 85 (5): 739-777
- Nowak, Norman D. (1970) *Tax Administration in Theory and Practice*, With *Special Reference to Chile*, New York: Praeger Publishers.
- Oguda, N. Joseph, Odhiambo Albert & John Byaruhanga, (2015) "Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County", *International Journal of Business and Management Invention*, 4 (1): 47-57.
- Ross, Stephen A., (1973) "The Economic Theory of Agency: Principal's problem", *American Economic Review*, 62 (2): 134-139.
- Strom, K., (2000) "Delegation and accountability in parliamentary democracies", *European Journal of Political Research*, 37: 261-289.
- Sudarmo, T. Sawardi dan Agus Yulianto, (2008) *Fraud Auditing*, Edisi Kelima, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP).
- Sugiono, (2004) *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.

The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO), (2010) "Fraudulent Financial Reporting: 1998 – 2007", *An Analysis of U.S. Public Company*. New York. USA.